



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 25 Januari 2021

Halaman: 2

UPAYA RELAKSASI DIPERTIMBANGKAN

Dampak Ekonomi Kebijakan PTKM Perlu Diperhatikan

YOGYA (KR) - Dampak ekonomi terkait kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) perlu diperhatikan. Hal ini karena sejumlah lokomotif ekonomi sedang mulai tumbuh di tengah pandemi namun kembali diberlakukan pembatasan.

Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, pihaknya tetap melakukan kajian terkait berbagai potensi dampak PTKM. Apalagi sudah ada kebijakan untuk diperpanjang selama dua pekan ke depan. "Kita masih mengkaji semuanya. Terutama bagaimana mendorong agar ekonomi tetap bisa tumbuh di masa PTKM ini," jelasnya, Minggu (24/1).

Kebijakan PTKM tersebut tidak hanya di Kota Yogya saja melainkan mayoritas diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sejauh ini pun tidak ada pembatasan wisatawan untuk berkunjung ke Yogya melainkan aktivitasnya yang harus disesuaikan. Begitu pula destinasi wisata serta usaha ekonomi lainnya tetap dapat berjalan seperti biasa. Hanya kapasitas pengunjung harus dibatasi.

Dampak ekonomi dari kebijakan PTKM diharapkan tidak berjalan sistemik seperti saat awal masa pandemi. Apalagi industri manufaktur maupun pekerjaan konstruksi tetap dapat berjalan 100 persen. Hanya bagi industri pariwisata dan hiburan menjadi sektor yang terpukul. Seperti hotel, restoran, kafe serta bioskop yang mengalami penurunan pengunjung imbas ada pembatasan.

Heroe menambahkan, upaya relaksasi bagi kalangan pelaku usaha saat ini pun tengah dipertimbangkan. Akan tetapi khusus mengenai relaksasi pajak diakuinya sulit terwujud. Hal ini karena pajak seperti hotel dan restoran, didasarkan pada transaksi dari konsumen. "Kalau tidak ada transaksi, maka tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Artinya, pajak itu bukan tetap dibayarkan tiap bulan. Misalkan tamunya banyak otomatis pajaknya besar, kalau tamunya sedikit maka pajaknya juga kecil. Pajak itu dibayarkan oleh konsumen pada saat transaksi," paparnya.

Meski demikian, wajib pajak yang menjadi pemungut pajak tetap dimungkinkan ada keringanan. Namun keringanan tersebut bukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan melainkan seperti penundaan penyeteroran ke kas daerah maupun pengurangan atau penghapusan denda administrasi.

Sebelumnya, kalangan usaha merasa prihatin dengan perpanjangan PTKM. Hal ini karena sebagai kota wisata, Yogya banyak mengandalkan sektor kegiatan hiburan. Lesunya industri pariwisata dikhawatirkan akan berimbas pada sektor lain seperti transportasi hingga pelaku UKM. Oleh karena itu, agar usaha bisa terus berjalan dan biaya operasional dapat ditekan, maka dibutuhkan relaksasi. Terutama beban operasional untuk kebutuhan listrik, air serta bahan bakar.

(Dhi)-f

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			
3. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005